



Media Title	Investor Daily		
Head Line	2014, akses Bandara Kualanamu Ditargetkan Tuntas		
Date	25 November 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	Eko Aditya Nugroho	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Pemda Diminta Mulai Bebaskan Lahan

Oleh Eko Adityo Nugroho

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum meminta pemerintah daerah untuk mempercepat proses pengadaan lahan proyek jalan tol Trans-Sumatera. Ini sebagai jawaban atas desakan pemerintah daerah se-Sumatera yang meminta penerbitan peraturan presiden (perpres) tol Trans-Sumatera.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, proses persiapan pembangunan proyek jalan tol tersebut saat ini terus berlanjut, meski perpres penugasan kepada perusahaan negara untuk membangun proyek itu belum keluar.

"Tol Trans-Sumatera tetap jalan," ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, setiap proyek jalan tol membutuhkan lahan yang proses pembebasan lahannya cukup sulit. Sebelum lahan bebas, infrastruktur jalan bebas hambatan tidak bisa dikerjakan. "Kalau gubernur dan kepala daerah ingin tol ini cepat dibangun, yang bisa dilakukan sekarang adalah membebaskan lahannya. Jadi, ketika sudah waktunya dibangun, prosesnya pun bisa cepat," ujar dia.

Djoko menambahkan, pemerintah telah memutuskan untuk membangun empat ruas jalan tol trans-Su-

matera terlebih dulu di samping ruas-ruas tol yang lain. Keempat ruas tol tersebut adalah Bakauheuni-Terbangi Besar, Palembang-Indralaya, Medan-Binjai, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai. "Pemerintah-pemerintah daerah yang dilalui keempat ruas tol itu harus segera menyelesaikan pengadaan lahannya," papar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menjelaskan, pemerintah daerah dapat membebaskan lahan tol Trans-Sumatera mulai saat ini dengan menggunakan Undang-Undang No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Undang-undang ini juga dinilai hampir menyamai kebijakan pembebasan lahan di Jepang.

"Di sana pemerintah fokus membebaskan lahan dulu selama lima tahun sebelum proyek itu dimulai. Tujuan-

nya agar proyek itu jelas waktu pembangunannya," ungkap dia.

Sebelum proses pembebasan lahan tersebut dilakukan, lanjut Djoko Murjanto, pemerintah bisa menyusun desain detail mengenai trase dan ROW jalan. Itu dilakukan agar proses pembebasan lahannya bisa segera dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Forum Gubernur Sewilayah Sumatera Gatot Pujjo Nugroho sebelumnya mengatakan, pemerintah provinsi se-Sumatera meminta pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan mempercepat proses pembangunan jalan tol tersebut.

"Dari berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan, ada beberapa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah, antara lain pembangunan trans-Sumatera yang harus dipercepat pembangunannya dan ada penugasan kepada BUMN yang ditunjuk," kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Kamaludin menambahkan, sebelum proyek itu dibangun oleh pemerintah pusat, masyarakat Sumatera merasa dianaktirikan lantaran adanya disparitas pembangunan antara pulau Jawa dan Sumatera.

"Namun, jika realisasi jalan tol Trans-Sumatera dapat diwujudkan, itu akan bisa mengurangi kemacetan, misalnya di Medan-Binjai. Selain itu, keberadaan tol akan mempercepat pertumbuhan ekonomi," jelas dia.